

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian lapangan serta memberikan beberapa saran kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan di Desa Purwosari. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor- faktor apa saja sebagai penyebab terjadinya kemiskinan di Desa Purwosari Kabupaten Wonosobo dalam perspektif teori paradigma demokrasi sosial disebabkan oleh Institusi/lembaga dan ketimpangan.

Pertama, Institusi/lembaga. Institusi/lembaga yang menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Desa Purwosari adalah lembaga desa yakni Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terkait dengan Pemerintah Desa, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Desa Purwosari. Pemerintah Desa Purwosari belum mampu memberikan jaminan dan bantuan sosial dengan tepat sasaran, sehingga bantuan yang diharapkan mampu mendukung perekonomian serta meningkatkan daya beli masyarakat miskin belum bisa berjalan optimal. Selain itu, pembangunan infrastruktur atau fisik yang dibangun oleh Pemerintah Desa Purwosari juga belum diimbangi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya perhatian Pemerintah Desa Purwosari dalam hal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) mengakibatkan masyarakat sulit mendapatkan fasilitas dalam rangka meningkatkan kualitas diri, sehingga

masyarakat sulit berkembang dan terjebak pada kemiskinan. Kemudian, penanggulangan kemiskinan belum menjadi bidang prioritas dalam APBDes di Desa Purwosari, hal ini dikarenakan anggaran yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan dari tahun 2019 hingga 2021 justru mengalami penurunan sebab anggaran dialokasikan untuk program lainnya seperti pembangunan infratraktur jalan, penataan ruang, penanganan Pandemi Covid-19, dan lainnya. Selain itu, Pemerintahan Desa Purwosari belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang digunakan untuk urusan penanggulangan kemiskinan. Kedua hal tersebut menyebabkan permasalahan kemiskinan belum ditangani secara serius dan mendalam di Desa Purwosari, sebab kurangnya anggaran serta tidak adanya aturan yang secara serius mengatur penanggulangan kemiskinan. Kemudian, masyarakat di Desa Purwosari belum merasakan fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yaitu KPMD, LPMD, dan TP-PKK dalam memberdayakan masyarakat sebagaimana tugas dan fungsinya, sehingga masyarakat masih belum mendapatkan dukungan dalam upaya memberdayakan dirinya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwosari yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat, mendukung pembangunan desa, mengelola potensi desa, serta mengurangi kemiskinan juga ternyata belum bisa berjalan sesuai dengan harapan dan perannya masih sangat rendah terhadap upaya mensejahterakan masyarakat. BUMDes yang masih memiliki banyak kekurangan tersebut, pada akhirnya juga belum mampu membantu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat miskin di Desa Purwosari. Dari beberapa hal tersebut, terlihat bahwa memang institusi/ lembaga di Desa Purwosari belum mampu

mendukung dan membantu masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan secara optimal, sehingga menyebabkan adanya permasalahan kemiskinan.

Kedua, ketimpangan. Ketimpangan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Purwosari. Pendidikan masyarakat di Desa Purwosari yang masih rendah serta minimnya pemberdayaan yang diberikan oleh pihak pemerintah desa turut menjadi penyebab rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakibat pada terjadinya kemiskinan. Kemudian, dalam faktor eksternal, disebabkan oleh minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Desa Purwosari. Lapangan pekerjaan yang tersedia di Desa Purwosari mayoritas hanya pada bidang pertanian, dengan gaji atau upah yang masih rendah. Masyarakat miskin di Desa Purwosari terjebak pada tingkat pendapatan dan produktivitas yang masih rendah, sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan ekonominya dengan layak. Faktor internal dan eksternal dalam ketimpangan tersebut, pada akhirnya turut menciptakan kemiskinan di Desa Purwosari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kemiskinan di Desa Purwosari disebabkan oleh faktor dari institusi/lembaga dan ketimpangan. Dalam hal ini seperti ketidaktepatan sasaran penerima jaminan dan bantuan sosial, BUMDes yang belum mampu menjalankan perannya dalam memperkuat perekonomian masyarakat, pembangunan infrastruktur atau fisik yang belum diimbangi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), penanggulangan kemiskinan belum menjadi bidang

prioritas dalam APBDes di Desa Purwosari, belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang digunakan untuk urusan penanggulangan kemiskinan, kurangnya peran Lembaga Kemasyarakatan (LKD) dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di Desa Purwosari serta minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Desa Purwosari.

Dari berbagai faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Desa Purwosari tersebut, ada beberapa saran dari peneliti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk pihak-pihak terkait.

1. Pemerintah Desa Purwosari hendaknya selalu melihat dan meninjau kondisi masyarakatnya secara langsung serta meningkatkan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial (Dinsos) untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bekerjasama dengan Pemerintah Desa Purwosari untuk memperbaiki BUMDes yang tidak produktif melalui skema revitalisasi supaya mengembalikan vitalitas BUMDes sebagai badan usaha yang menghimpun dan mewadahi potensi lokal desa sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya keluarga miskin.
3. Pemerintah Desa Purwosari berupaya menyeimbangkan pembangunan infrastruktur atau fisik dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga tidak terjadi ketimpangan. Serta pada penyusunan APBDes kedepannya, penanggulangan kemiskinan harus menjadi program prioritas dan menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang digunakan untuk urusan

penanggulangan kemiskinan supaya permasalahan kemiskinan dapat segera ditangani dengan serius.

4. Melakukan penataan dan pemahaman lebih dalam kepada anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terkait tugas dan fungsinya supaya dapat berjalan dengan efektif dalam rangka memberikan pemberdayaan, swadaya, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Pemerintah Desa Purwosari menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara memberikan pembinaan terlebih dahulu berupa keterampilan dan pendampingan, hal ini sekaligus dalam rangka meningkatkan kualitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di Desa Purwosari. Kemudian, berupaya memotivasi masyarakat untuk mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola hasil pertanian dengan nilai jual yang lebih tinggi. Sehingga pertanian sebagai mata pencaharian mayoritas masyarakat di Desa Purwosari tetap dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan layak.
6. Bagi masyarakat harus memiliki semangat untuk terus berjuang melawan kemiskinan. Masyarakat berusaha menempuh pendidikan minimal 12 tahun, dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti berbagai kegiatan pemberdayaan, pengetahuan, dan keterampilan agar ilmunya dapat bermanfaat secara berkelanjutan. Sehingga diharapkan dapat digunakan untuk mencoba mendapatkan penghasilan lain, sehingga mampu memenuhi kebutuhan bagi keluarga baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.